

UNTUK LINDUNGI KONSUMEN

Perlu Tertib Metrologi

PURBALINGGA (KR) - Pelayanan metrologi yang prima kepada masyarakat bisa melindungi konsumen. Aturan kemetrologian yang telah disahkan mengatur segala hal yang berhubungan dengan pengukuran seperti satuan, metode dan lain sebagainya sehingga hak-hak konsumen akan terlindungi. "Aturan itu merupakan upaya melindungi konsumen sesuai dengan amanat Undang-Undang," kata Arif Fajar Solihin dari Badan Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II pada Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kamis (23/2) di Graha Adiguna Kompleks Pendapa Dipokusumo Purbalingga.

Menurutnya, WBK merupakan upaya menanamkan integritas kepada personal yang menaungi metrologi legal sehingga perniagaan di Indonesia umumnya dan Purbalingga khususnya akan lebih tergaransi. "Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Purbalingga yang telah berkomitmen kepada hal tersebut," tandas Arif. Wakil Bupati Purbalingga, Sudono menyebutkan penghargaan tertib ukur yang diterima Pemkab Purbalingga beberapa waktu lalu harus menjadi motivasi dalam melayani masyarakat. Sudono juga menyampaikan apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menerapkan WBK. **(Rus)-f**

LONGSOR DI KABUPATEN TEGAL 20 Warga Mengungsi

SLAWI (KR) - Sedikitnya 8 rumah rusak parah dan 6 warga luka akibat tanah longsor di wilayah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, Kamis (23/2). Sekitar 20 warga terpaksa mengungsi di tempat pengungsian setempat. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tegal dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal merinci rumah warga yang rusak itu berada di Desa Bumijawa 5 rumah, Desa Sumbaga 2 rumah, dan Desa Dukuhbenda 1 rumah.

"Akibat bencana itu, sedikitnya 20 jiwa dari 4 kepala keluarga (KK) mengungsi," jelas Ketua PMI Kabupaten Tegal, Iman Sisworo melalui Kepala Markas PMI, Sunarto. Kerusakan rumah mayoritas pada dinding kamar dan ruang tamu jebol, dapur ambruk dan talud atau pondasi tebing longsor. Sejumlah warga mengalami luka akibat tanah longsor. "Para pemilik rumah mengalami kerugian cukup besar. Totalnya sekitar Rp 55 juta," ungkap Sunarto.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Tegal, Elliyah Hidayah membenarkan peristiwa longsor itu. Penyebab longsor bermula saat hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bumijawa, Selasa (21/2) sekitar pukul 13.30. Ia mensinyalir aliran air tersumbat sehingga mengakibatkan tebing dan talud longsor. Beberapa rumah warga yang berdiri bersebelahan dengan tebing juga terbawa longsor, bahkan ada rumah warga yang tertimbun material longsor. **(Ryd)-f**

JAWAB ASPIRASI MASYARAKAT SUKOHARJO DPRD dan Pemkab Tetapkan 2 Raperda

SUKOHARJO (KR) - Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ditetapkan dan disetujui bersama antara DPRD dan Pemkab Sukoharjo. Penetapan dan persetujuan digelar dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sukoharjo, Kamis (23/2).

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutannya menyatakan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD setempat yang telah bekerja keras dan telah berusaha maksimal

sejak 17 November 2022 sampai penetapan persetujuan bersama DPRD dan Pemkab Sukoharjo.

"Ini merupakan bukti besarnya perhatian dan tanggungjawab pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat," ungkapnya. Menurut bupati, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.

Pendidikan dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin juga dinilai merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum sesuai amanah dari Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum.

"Saya berpendapat, Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," tandas Etik Suryani. **(Mam)-f**



KR-Wahyu Imam Ibadri

Bupati dan Ketua DPRD Sukoharjo saat penetapan dan persetujuan bersama dua Raperda.

RUTAN SOLO PINDAH KE KARANGANYAR

Lokasi Strategis dan Nyaman

KARANGANYAR (KR) - Pemkab Karanganyar menandatangani pelepasan asetnya berupa tanah seluas 3,2 hektare ke Kementerian Hukum dan HAM. Lahan berlokasi di wilayah Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kota itu bakal diban-

gunun rumah tahanan (rutan). "Rutan tersebut pindahan dari Rutan Kelas IA Surakarta, karena rutan Solo sudah over kapasitas warga binaan serta kurang representatif," jelas Juliyatmono.

Mewakili Pemkab Karanganyar, Bupati Juliyat-

mono menandatangani naskah hibah lahan tersebut. Kemudian hibahnya diterima Kemenkum HAM, dalam hal ini diwakili Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM RI, Yuspahrudin. Diharapkan, rutan segera dibangun agar bermanfaat dan nyaman bagi penghuninya dan bisa memuaskan manusia.

Lokasi pembangunannya di rute ke wilayah Matesih, dinilai strategis. Para pembesuk dapat berwisata religi ke Astana Giribangun dan Astana Mangadeg. Kemudian berlanjut ke Karangpandan, Ngargoyoso maupun ke Tawangmangu.

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM RI, Yuspahrudin mengatakan pe-

mindahan Rutan Solo ke Karanganyar menanti fisik bangunan siap. Rencananya, pembangunan dimulai tahun ini dengan perkiraan anggaran minimal Rp 70 miliar. "Biasanya membangun rutan minimal Rp 70 miliar. Nanti melihat kondisi politik terkini. Bisa sampai dua atau tiga tahun pembangunannya. Mungkin juga Pak Presiden memerintahkan segera selesai tahun ini," jelasnya.

Bermodal lahan 3,2 hektare, lanjut Yuspahrudin, mampu melipatgandakan daya tampung Rutan Solo yang berkapasitas normal 250 warga binaan. Di rutan Solo, lahannya hanya sekitar 900 meterpersegi. Ia perkiraan daya tampung ideal rutan di Karanganyar nantinya mini-

mal 500 orang, yang bisa dimaksimalkan sampai 600-an warga binaan. Selain itu, masih bisa dibangun kompleks rumah dinas sipir penjara dan pejabat rutan lainnya.

"Yang masuk ke rutan di Karanganyar ini dari kabupaten/kota di sekitarnya. Jadi memang harus lebih besar daripada yang di Solo. Semoga dengan ini nantinya bisa menjamin kesehatan, pelatihan, kemandirian dan kepribadian warga binaan," tandas Yuspahrudin.

Ia menyebut, idealnya tiap kabupaten/kota memiliki rutan. Adapun Jawa Tengah termasuk provinsi yang paling banyak memiliki rutan di Indonesia, disusul kemudian Jawa Barat dan Sumatera Utara **(Lim)-f**



KR-Abdul Alim

Bupati Karanganyar bersama pejabat dari Kemenkum HAM RI menunjukkan naskah hibah lahan calon lokasi rutan.

HUKUM

SEBAGIAN TANAH PASAR SANGKALPUTUNG MILIK WARGA Pemilik Tanah Akan Gugat Pemkab Banyumas

BANYUMAS (KR) - Pemilik tanah dan pemegang sertifikat hak milik yang tanahnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas untuk Pasar Sangkalputung Sokaraja, akan menggugat Pemkab jika tanahnya tidak dikembalikan. Permintaan itu disampaikan oleh Bambang Puji, Rabu (22/2).

Bambang Puji menjelaskan, Pasar Sangkalputung di Desa Sokaraja Tengah tersebut berdiri pada tahun 1984. Sedang tanah miliknya seluas 1.277 meter persegi itu bersertifikat atasnama Hendro Puji Santoso bernomor 351 tahun 1981. "Dulu orangtua saya menanyakan ke Pemkab, mau dibeli atau ditukar, jika ditukar mana gantinya. Mungkin dijanjikan oleh pemerintahan terdahulu, tapi sampai saat ini belum ada realisasi," ungkap Puji.

Berkaitan permasalahan itu, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mengembalikan haknya. Pada sekitar tahun 2000-an pihaknya telah berkirin surat ke Pemkab Banyumas, namun baru direspon pada tahun pertengahan 2022 lalu.

Ia juga melayangkan dua kali somasi ke Pemkab Banyumas, yaitu pada 9 Januari 2023 dan 18 Januari 2023. Selain itu, pihaknya juga telah menggelar pertemuan dengan Pemkab, namun belum ada titik temu.

"Kemarin sudah dijawab bahwa Pemkab Banyumas bersedia dan siap untuk membeli, tapi saya di sini tidak tanyakan dibeli atau gimana. Kalau masalah dibeli itu nanti, yang pertama dan utama saya

minta secara pengakuan formal dari Pemkab tanah Pasar Sangkalputung itu milik saya," ungkapnya.

Permintaan pengembalian tanah juga disampaikan melalui sejumlah spanduk yang dipasang di area pasar. Spanduk itu antara lain bertuliskan, 'Pak Bupati mohon mengembalikan hak tanah kami'. Selain itu, juga terdapat spanduk bertuliskan, 'Tanah Pasar Sangkalputung Sokaraja dalam sengekata' dan 'Pak Bupati tidak berhak mengklaim tanah Pasar Sangkalputung'.

Dihubungi terpisah Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Banyumas, Sarikin, membenarkan sebagian tanah Pasar Sangkalputung itu atasnama warga. "Milik Hendro Puji Santoso sesuai sertifikat, sebagian yang sebelah barat sekitar 1.277 meter persegi," jelas Sarikin.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Banyumas, Amrin Ma'ruf, menambahkan pihaknya sedang menelusuri legalitas kepemilikan tanah tersebut. Kemudian jika terbukti milik warga, Pemkab akan membeli tanah tersebut.

"Kami komitmen, tapi harus pakai aturan jangan sampai di kemudian hari ada bukti bahwa itu milik pemda, ternyata dibeli pemda. Ini harus diclearkan dulu," kata Amrin.

Amrin menjelaskan di lahan pasar itu terdapat dua sertifikat. Sebagian milik pemerintah desa setempat dan sebagian milik warga. **(Dri)-f**



KR-Driyanto

Pasar Sangkalputung Sokaraja dalam sengketa.

MAYAT KORBAN DIBUANG DI KALIGESING Polisi Tangkap 6 Pelaku Pembunuhan Warga Bantul

PURWOREJO (KR) - Jajaran Satreskrim Polres Purworejo bekerjasama dengan Subdit Jatnras Direskrimum Polda DIY berhasil mengungkap pembunuhan dengan korban Baharudin Wicaksono atau Didin warga Pleret Bantul yang mayatnya ditemukan di jurang Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Purworejo. Polisi menangkap enam terduga pelaku pembunuhan itu di sejumlah lokasi Yogyakarta.

Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Khusein Martono SH MH, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari diketahuinya identitas korban. "Kami melakukan pelacakan kepada keluarganya, kemudian ketemu dengan seseorang yang dekat dengan korban, lalu didapat fakta jika korban dijemput beberapa orang sebelum akhirnya ditemukan tewas," ungkapnya, Jumat (24/2).

Polisi mengembangkan kasus tersebut dan berhasil mengamankan enam terduga pelaku pembunuhan. Mereka ditangkap di rumah kontrakan atau tempat tinggal masing-masing di Yogyakarta.

Enam tersangka berinisial Chr (28), Muh (26), Fai (25), Alo (24), Isi (26), dan Ahm (18). Mereka terdapat

sebagai warga Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman dan Wonosobo.

Menurutnya, pembunuhan itu bermotif utang piutang antara korban dan pelaku berinisial Chr. Chr menggadaikan sepeda motornya kepada korban.

"Namun oleh korban digadaikan lagi kepada orang lain dengan nilai lebih tinggi tanpa sepengetahuan tersangka. Awalnya digadaikan Rp 4 juta, sama korban ditumpangi utang Rp 1,5 juta," terangnya.

Ketika masa gadai jatuh tempo, katanya, pelaku kaget karena utang gadainya bertambah banyak akibat ditumpangi keuntungan oleh korban.

"Motor tidak bisa diambil kalau utang tidak dilunasi, jadi pelaku menagih korban, tapi karena tidak ada uang dan pelaku ka-

lap," tuturnya.

Chr menghubungi Muh dan menyampaikan masalah itu. Kemudian disepakati akan memberi pelajaran kepada korban. Muh mengajak enam rekannya untuk ikut menganiaya korban. "Korban dijemput dengan mobil rental dari tempat kosnya pada Rabu (15/2) malam untuk diminta pertanggungjawaban," tuturnya.

Polres Purworejo gelar kasus pembunuhan warga Bantul yang dibuang di Purworejo.



KR-Jarot Sarwosambodo

Polres Purworejo gelar kasus pembunuhan warga Bantul yang dibuang di Purworejo.

Penipu Investasi Bodong Dibekuk

PURWOKERTO (KR) - Tim gabungan Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Purwokerto Timur bersama Unit Reserse Mobil (Resmob) Satreskrim Polresta Banyumas, berhasil mengungkap kasus penipuan berkedok investasi pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit bodong.

Kapolresta Banyumas Kombes Edy Suranta Sitepu didampingi Kapolsek Purwokerto Timur AKBP Sambas Budi Waluyo, Kamis (23/2), menjelaskan kasus ini terungkap berkat laporan korban atasnama Bagus (57) warga Tasikmalaya Jawa Barat, yang berdomisili di Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara.

"Kasus tersebut bermula dari pertemuan dengan para pelaku

di kompleks stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berlokasi di Jalan Overste Isdiman, Kecamatan Purwokerto Timur, sekitar bulan Desember 2019," jelas Sambas.

Dalam pertemuan tersebut, korban ditawarkan oleh dua pelaku yang berinisial SW (59) dan MAS (57) warga Purwokerto Timur, untuk berinvestasi dengan membuka usaha bersama berupa pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit di Riau.

Dari investasi yang diberikan, korban dijanjikan memperoleh saham perusahaan pengolahan minyak sawit tersebut.

Korban pun menyanggupi untuk memberikan modal sebesar Rp 50 juta dari kebutuhan anggaran Rp 250

juta. Setelah menunggu cukup lama, korban pun melakukan pengecekan namun ternyata pabrik pengolahan minyak sawit tersebut tidak ada.

Selanjutnya korban menghubungi para pelaku guna menanyakan modal yang disetorkan untuk pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit itu.

"Pelaku menjanjikan akan mengembalikan modal usaha tersebut kepada korban, namun hanya diyakinkan dengan foto cek yang ternyata kosong," jelasnya.

Lantaran merasa tertipu, korban melaporkan kasus tersebut ke Polsek Purwokerto Timur yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan. **(Dri)-f**